

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 15 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

WIRATNO, S.H.
NIP. 197202131993031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	34
B.2. Belanja.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	41
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	47
C.6. Ekuitas	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2.	Beban Pegawai	48
D.3.	Beban Persediaan	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	51
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	52
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	52
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	54
D.11.	Beban Lain-lain.....	55
D.12.	Kegiatan Non Operasional	55
D.13.	Pos Luar Biasa	56
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	57
E.1.	Ekuitas Awal	57
E.2.	Surplus (defisit) LO	57
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	57
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	57
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	58
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	58
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	58
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	59
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	59
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	59
E.3.	Ekuitas Akhir.....	60
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	61
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	61
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	61
	Daftar dan Lampiran	63

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	64
Daftar Hibah Langsung.....	67

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 15 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

WIRATNO, S.H.
NIP. 197202131993031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.732.706 atau mencapai 109,46 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp16.200.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp6.569.975.879 atau mencapai 94,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.989.023.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.883.958.068, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp4.532.560; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.879.425.508; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp16.883.958.068, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp16.883.958.068.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 17.635.840, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 6.760.751.793 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 6.743.115.953) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 188.696 dan surplus(defisit) sebesar Rp 188.696 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 6.742.927.257)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp 5.980.866.417 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 6.742.927.257) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 11.093.775.735 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.552.243.173 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp 16.883.958.068.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	16.200.000	17.732.706	109,46	13.659.016
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			16.200.000	17.732.706	109,46	13.659.016
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.787.410.000	5.406.203.316	93,41	5.258.149.366
2.	Belanja Barang	B.2.2.	989.713.000	952.776.563	96,27	609.947.103
3.	Belanja Modal	B.2.3.	211.900.000	210.996.000	99,57	105.465.000
Jumlah Belanja Negara			6.989.023.000	6.569.975.879	94,00	5.973.561.469

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	4.532.560	5.376.775
Jumlah Aset Lancar		4.532.560	5.376.775
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	11.109.426.000	4.089.224.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.335.436.209	2.124.440.209
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.663.510.000	5.065.365.550
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	36.460.000	29.150.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	48.152.062	48.152.062
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(2.313.558.763)	(5.380.803.679)
Jumlah Aset Tetap		16.879.425.508	5.975.528.142
Jumlah Aset		16.883.958.068	5.980.904.917
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	38.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	38.500
Jumlah Kewajiban		0	38.500
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		16.883.958.068	5.980.866.417
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		16.883.958.068	5.980.904.917

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	17.635.840	13.078.540
Jumlah Pendapatan		17.635.840	13.078.540
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	5.406.203.316	5.258.149.366
Beban Persediaan	D. 3	72.508.845	72.255.245
Beban Barang dan Jasa	D. 4	434.474.628	330.769.282
Beban Pemeliharaan	D. 5	411.489.891	194.063.646
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	35.200.744	14.220.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	400.874.369	219.583.676
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		6.760.751.793	6.089.041.215
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6.743.115.953)	(6.075.962.675)
Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	198.746	1.321.616
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		10.050	193.395
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		188.696	1.128.221
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		188.696	1.128.221

Pos Luar Biasa

D. 13

Pendapatan PNPB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(6.742.927.257)	(6.074.834.454)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas Awal	E. 1	5.980.866.417	6.135.067.879
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(6.742.927.257)	(6.074.834.454)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	11.093.775.735	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(39.269.461)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	6.552.243.173	5.959.902.453
Kenaikan/penurunan Ekuitas		10.903.091.651	(154.201.462)
Ekuitas Akhir		16.883.958.068	5.980.866.417

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung. dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp17.732.706*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 17.732.706 atau mencapai 109,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 16.200.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.200.000	7.361.600	102,24
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	9.000.000	10.274.240	114,15
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	96.866	0,00
Total Pendapatan		16.200.000	17.732.706	109,46

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.073.690 atau 22,97 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Meningkatnya pembayaran uang muka gaji untuk Hakim di Pengadilan Negeri Bantul;

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.361.600	3.900.700	3.460.900	47,01
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	10.274.240	9.177.840	1.096.400	10,67
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	96.866	580.476	(483.610)	(499,26)
Total Pendapatan		17.732.706	13.659.016	4.073.690	22,97

B.2. Belanja

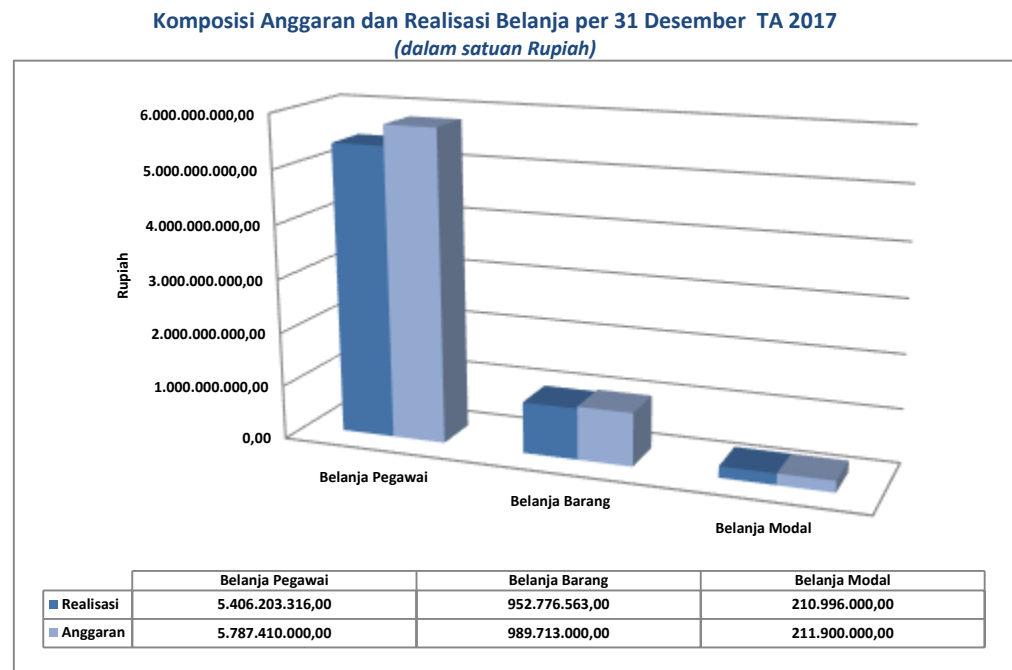
Realisasi
Belanja Negara
: Rp
6.569.975.879

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 6.569.975.879 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 94,00% dari anggaran senilai Rp. 6.989.023.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.787.410.000	5.406.203.316	93,41
Belanja Barang	989.713.000	952.776.563	96,26
Belanja Modal	211.900.000	210.996.000	99,57
Total Belanja Bruto	6.989.023.000	6.571.116.609	94,02
Pengembalian Belanja		(1.140.730)	0
Total Belanja Netto	6.989.023.000	6.569.975.879	94,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 596.414.410 atau sebesar 9,08 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Telah terisinya jabatan struktural serta fungsional dan juga kenaikan tunjangan pejabat atas kenaikan kelas Pengadilan Negeri Bantul.
2. Terealisasinya belanja pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan kendaraan dan juga operasional perkantoran.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	5.406.203.316	5.258.149.366	148.053.950	2,74
Belanja Barang	952.776.563	609.947.103	342.829.460	35,98
Belanja Modal	210.996.000	105.465.000	105.531.000	50,02
Total Belanja	6.569.975.879	5.973.561.469	596.414.410	9,08

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
5.406.203.316

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 5.406.203.316 dan Rp. 5.258.149.366.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,74 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Telah terisinya jabatan struktural serta fungsional Pengadilan Negeri Bantul.
2. Kenaikan tunjangan hakim serta pejabat Pengadilan Negeri Bantul atas kenaikan kelas Pengadilan Negeri Bantul.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.563.955.000	2.616.913.800	(52.958.800)	(2,07)
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.098	29.673	4.425	12,98
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	162.927.420	161.169.234	1.758.186	1,08
Beban Tunj. Anak PNS	41.901.572	40.326.792	1.574.780	3,76
Beban Tunj. Struktural PNS	16.770.000	18.780.000	(2.010.000)	(11,99)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.836.955.000	1.608.125.000	228.830.000	12,46
Beban Tunj. PPh PNS	183.459.696	188.053.043	(4.593.347)	(2,50)
Beban Tunj. Beras PNS	126.952.260	123.838.200	3.114.060	2,45
Beban Uang Makan PNS	436.219.000	427.558.000	8.661.000	1,99
Beban Tunjangan Umum PNS	37.770.000	39.200.000	(1.430.000)	(3,79)
Beban Uang Lembur	0	34.156.000	(34.156.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	5.406.944.046	5.258.149.742	148.794.304	2,75
Pengembalian Belanja	(740.730)	(376)	(740.354)	99,95
Total Belanja Netto	5.406.203.316	5.258.149.366	148.053.950	2,74

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
:
Rp952.776.563

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 952.776.563 dan Rp. 609.947.103.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 35,98 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran Tahun 2017 lebih besar dari pada Tahun Anggaran 2016,
2. Terserapnya dengan baik anggaran non operasional perkantoran,
3. Terserapnya dengan baik pemeliharaan gedung dan bangunan serta anggaran operasional perkantoran. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	393.906.930	302.091.556	91.815.374	23,31
Belanja Barang Non Operasional	3.483.000	4.180.000	(697.000)	(20,01)
Belanja Jasa	115.202.748	106.023.401	9.179.347	7,97
Belanja Pemeliharaan	405.383.141	183.432.146	221.950.995	54,75
Belanja Perjalanan Dinas	35.200.744	14.220.000	20.980.744	59,60
Total Belanja Brutto	953.176.563	609.947.103	343.229.460	36,01
Pengembalian Belanja	(400.000)	0	(400.000)	0
Total Belanja Netto	952.776.563	609.947.103	342.829.460	35,98

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp210.996.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 210.996.000 dan Rp. 105.465.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 50,02 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran Tahun 2017 lebih besar dari pada Tahun Anggaran 2016,
2. Seluruh anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan pada Tahun Anggaran ini mampu diserap secara maksimal.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	210.996.000	105.465.000	105.531.000	50,02
Total Belanja Brutto	210.996.000	105.465.000	105.531.000	50,02
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	210.996.000	105.465.000	105.531.000	50,02

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
4.532.560

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.532.560 dan Rp. 5.376.775.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	4.532.560	5.376.775
Total Aset Lancar	4.532.560	5.376.775

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016
Jumlah		0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp4.532.560*

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.532.560 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	4.450.560	4.849.775
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	82.000	527.000
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		4.532.560	5.376.775

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan nomor :W13.U5/223/PL.07/I/2018.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
16.879.425.508*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 16.879.425.508 dan Rp. 5.975.528.142. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	11.109.426.000	4.089.224.000	7.020.202.000
2	Peralatan dan Mesin	2.335.436.209	2.124.440.209	210.996.000
3	Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	5.065.365.550	598.144.450
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	29.150.000	7.310.000
5	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	19.192.984.271	11.356.331.821	7.625.656.450
	Akumulasi Penyusutan	2.313.558.763	5.380.803.679	3.067.244.916
	Nilai Buku Aset Tetap	16.879.425.508	5.975.528.142	10.903.897.366

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp11.109.426.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.109.426.000 dan Rp. 4.089.224.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	295	SHP No. 18	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	864.357.000
2	2	305	SHP No. 17	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	440.115.000
3	3	324	SHP No. 16	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	467.532.000
4	4	358	SHP No. 36	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	516.594.000
5	5	391	SHP No. 19	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	318.903.000

6	6	399	SHP No. 20	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	575.757.000
7	7	434	SHP No. 37	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	626.262.000
8	8	630	SHP No. 06	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Rumah Dinas	1.357.020.000
9	1	2.759	SHP No.07	Pemerintah RI c.q. Makamah Agung RI	Kantor Pemerintah	5.942.886.000
Jumlah						11.109.426.000

Terdapat kenaikan nilai tanah disebabkan adanya Inventarisasi dan Penilaian (revaluasi) terhadap aset tanah pada Tahun Anggaran 2017 ini. Tidak terdapat anggaran belanja modal pembelian tanah pada Tahun Anggaran 2017 ini.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.335.436.209*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.335.436.209 dan Rp. 2.124.440.209.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	2.124.440.209
Mutasi Tambah	
Pembelian	210.996.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	2.335.436.209
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	2.076.608.133
Nilai Buku 31 Desember 2017	238.828.076

Realisasi belanja aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal peralatan dan mesin meningkat dibandingka tahun anggaran Tahun anggaran yang lalu, dan belanja modal peralatan dan mesin tersebut mampu diserap maksimal pada Tahun Anggaran ini.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
5.663.510.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.663.510.000 dan Rp. 5.065.365.550.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	5.065.365.550
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi Aset	598.144.450
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	5.663.510.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	227.835.630
Nilai Buku 31 Desember 2017	5.435.674.370

Terdapat kenaikan Gedung dan Bangunan yang disebabkan adanya Inventarisasi dan Penilaian (revaluasi) terhadap aset gedung Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun Anggaran 2017 ini. Selain itu tidak terdapat anggaran belanja modal pembelian Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2017 ini.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
36.460.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 36.460.000 dan Rp. 29.150.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	29.150.000
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi Aset	7.310.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	36.460.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	9.115.000
Nilai Buku 31 Desember 2017	27.345.000

Terdapat kenaikan nilai pada Jalan,Irigasi dan Jaringan yang disebabkan adanya Inventarisasi dan Penilaian pada aset Jalan,Irigasi dan Jaringan oleh kantor Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun Anggaran 2017 ini. dan juga tidak terdapat anggaran belanja modal pembelian Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2017 ini.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
48.152.062*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.152.062 dan Rp. 48.152.062.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	48.152.062
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2017	48.152.062
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
2.313.558.763

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp2.313.558.763 dan Rp5.380.803.679.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.335.436.209	2.076.608.133	258.828.076
2	Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	227.835.630	5.435.674.370
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	9.115.000	27.345.000
4	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	0	48.152.062
	Jumlah	7.625.656.450	3.468.119.285	5.769.999.508

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
16.883.958.068*

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.883.958.068 dan Rp5.980.866.417. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 10.903.091.651 182,29% dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0 , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 38.500

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp17.635.840 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp17.635.840 dan Rp13.078.540. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.200.000	7.361.600	102,24
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	9.000.000	10.274.240	114,15
6.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0,00	0,00
Total Pendapatan		16.200.000	17.635.840	108,86

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 5.406.203.316 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.406.203.316 dan Rp5.258.149.366. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.563.955.000	2.616.913.800	(52.958.800)	(2,02)
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.098	29.673	4.425	14,91
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	162.927.420	161.169.234	1.758.186	1,09
Beban Tunj. Anak PNS	41.901.572	40.326.792	1.574.780	3,90
Beban Tunj. Struktural PNS	16.770.000	18.780.000	(2.010.000)	(10,70)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.836.955.000	1.608.125.000	228.830.000	14,22
Beban Tunj. PPh PNS	183.459.696	188.053.043	(4.593.347)	(2,44)
Beban Tunj. Beras PNS	126.952.260	123.838.200	3.114.060	2,51
Beban Uang Makan PNS	436.219.000	427.558.000	8.661.000	2,02
Beban Tunjangan Umum PNS	37.770.000	39.200.000	(2.170.000)	(5,53)
Beban Uang Lembur	0	34.156.000	(34.156.000)	(100,00)
Total Beban Pegawai	5.406.944.046	5.258.149.742	34.156.000	83,04

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp72.508.845*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 72.508.845 dan Rp. 72.255.245. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	72.508.845	72.255.245	253.600	0,35
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	72.508.845	72.255.245	253.600	0,35

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa :
Rp434.474.628

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 434.474.628 dan Rp. 330.769.282. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban keperluan perkantoran	185.912.360	156.159.461	29.752.899	19,05
Beban pengiriman surat dinas	20.311.150	16.567.920	3.743.230	22,59
Beban honor operasional	48.600.000	47.800.000	800.000	1,67
Beban barang operasional lain	61.003.870	0	61.003.870	0
Beban bahan	3.483.000	0	3.483.000	0
Beban langganan listrik	108.559.756	100.401.293	8.158.463	8,12
Beban langganan Telepon	5.446.092	5.044.708	401.384	7,95
Beban langganan Air	1.158.400	615.900	542.500	88,08
Beban Barang Non Operasional lainnya	0	4.180.000	(4.180.000)	(100,00)
Total Beban Jasa	434.474.628	330.769.282	542.500	47,48

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp411.489.891

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 411.489.891 dan Rp. 194.063.646. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	216.252.250	58.171.539	158.080.711	271,74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.794.500	16.463.462	25.331.038	153,86
Beban persediaan bahan untuk Pemeliharaan	6.106.750	10.631.500	(4.524.750)	(42,55)
Total Beban Pemeliharaan	411.489.891	194.063.646	217.426.245	52,84

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp35.200.744

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.200.744 dan Rp. 14.220.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	33.000.744	10.590.000	22.410.744	211,62
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.200.000	3.630.000	(1.430.000)	(39,39)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	35.200.744	14.220.000	20.980.744	59,60

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp400.874.369*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 400.874.369 dan Rp. 219.583.676. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.621.739	107.687.395	2.934.344	2,72
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	279.680.130	102.498.156	177.181.974	172,86
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.572.500	2.915.000	7.657.500	262,69
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	400.874.369	213.100.551	187.773.818	46,84
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	6.483.125	(6.483.125)	(100)
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	400.874.369	219.583.676	181.290.693	45,22

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp188.696*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional lainnya
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	198.746	1.321.616	(1.122.870)	(84,96)
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	10.050	193.395	(183.345)	(94,80)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	188.696	1.128.221	(939.525)	(83,27)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.980.866.417 dan Rp. 6.135.067.879

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp. 6.742.927.257) dan (Rp. 6.074.834.454) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.093.775.735 dan Rp. 0 Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi yang dilakukan oleh kpknl untuk tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jembatan.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan (Rp. 39.269.461) Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.552.243.173 dan Rp. 5.959.902.453.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(17.732.706)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.569.975.879
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar (Rp. 17.732.706) sedangkan DKEL sebesar Rp. 6.569.975.879

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.883.958.068 dan Rp. 5.980.866.417 .

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2017 ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pengungkapan terhadap neraca akrual untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

BRI Cabang Bantul A/C 0236-01-000627-30-2 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK dari akun belanja pemeliharaan mesin menjadi akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
2. Perubahan pejabat perbendaharaan.
3. Penambahan pagu belanja barang operasional Lainnya dari BUA sebesar Rp.20.000.000.

F.2.5. Ralat SPM, SSPB, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SPD2D, SSPB dan SSPB yang terjadi pada Tahun Anggaran 2017 laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 365 /PA/SK/XII/2016 tentang Petikan Surat Keputusan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H.

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Wiratno, S.H.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	691.015.828	667.009.041	24.006.787	691.015.828	0
3	Alat Kantor	5	260.130.750	193.173.972	9.162.452	202.336.424	57.794.326
4	Alat Rumah Tangga	5	613.942.631	552.006.381	17.897.500	569.903.881	44.038.750
5	Alat Studio	5	27.430.000	7.530.000	3.980.000	11.510.000	15.920.000
6	Alat Komunikasi	5	7.890.000	7.890.000	0	7.890.000	0
7	Unit Alat Laboratorium	8	-	-	-	-	-
8	Komputer Unit	4	508.446.000	381.542.875	33.593.750	415.136.625	93.309.375
9	Peralatan Komputer	4	208.581.000	138.834.125	21.981.250	160.815.375	47.765.625
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	4.713.053.000	2.844.698.408	238.088.265	194.680.429	4.518.372.571
2	Bangunan Gedung Tempat	50	794.315.000	533.986.427	38.781.702	31.296.368	763.018.632

	Tinggal						
3	Tugu/tanda Batas	50	156.142.000	14.269.950	2.810.163	1.858.833	154.283.167
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Jalan	10	36.460.000	21.862.500	10.572.500	9.115.000	27.345.000
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	48.152.062	0	0	0	48.152.062
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	850.000	850.000	0	850.000	0
2	Alat Kantor	5	38.872.000	38.872.000	0	38.872.000	0
3	Alat Rumah Tangga	5	17.366.000	17.366.000	0	17.366.000	0
4	Komputer Unit	4	1.833.000	1.833.000	0	1.833.000	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					2.447.049.763	5.721.847.446
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya					2.495.201.825	5.769.999.508

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Bantul

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah :						



Catatan atas

an Keuangan

005

01

0400

400172

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGARA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}